

Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI

LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI

Syamsul Maarif

Bencana Ditinjau Dari Aspek Sosiologi

Siti Arieta

**Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Pada
Kampung Hijau Gambiran Kota Yogyakarta**

Baiq Lily Handayani

**Jaringan Kelompok Perempuan Dalam Manajemen Bencana Di
Desa Kemiri, Panti, Jember**

Abdus Sair

**Penanggulangan Bencana Berbasis
Pengembangan Komunitas (Community Development)**

Ninna Rohmawati

**Penanganan Gizi Dalam Situasi Darurat (Handling Nutrition in
an Emergency Situation)**

Atik Rahmawati

**Dari Nomaden Ke Permukiman Permanen: Upaya
Preventif Suku Laut (Sea Nomade) Terhadap Ancaman
Hidup Di Laut**

Jurnal Entitas Sosiologi	Volume II	Nomor 01	Jember Februari 2015	Halaman 118-231	ISSN: 2088-8260
--------------------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------	--------------------



JURNAL ENTITAS SOSIOLOGI

Syamsul Maarif

Bencana Ditinjau Dari Aspek Sosiologi

118-140

Siti Arieta

Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Pada

Kampung Hijau Gambiran Kota Yogyakarta

141-161

Baiq Lily Handayani

Jaringan Kelompok Perempuan Dalam Manajemen

Bencana Di Desa Kemiri, Panti, Jember

162-180

Abdus Sair

Penanggulangan Bencana Berbasis

Pengembangan Komunitas (*communitydevelopment*)

-181-201

Ninna Rohmawati

Penanganan Gizi Dalam Situasi Darurat

(*handling nutrition in an emergency situation*)

202-212

Atik Rahmawati

Dari Nomaden Ke Permukiman Permanen: Upaya

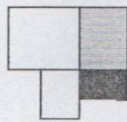
Preventif Suku Laut (*sea nomade*) Terhadap Ancaman

Hidup Di Laut

213-231

ISSN:2088-8260

Volume II, Nomor 1, Februari 2015



JURNAL ENTITAS SOSIOLOGI

Terbit dua kali dalam setahun pada bulan September dan Februari serta memuat artikel yang berbasis sosiologi diangkat dari hasil penelitian dan kajian mendalam. Jurnal ini menerima sumbangan tulisan dari berbagai pihak sebagai media pengembangan sumber daya manusia.

Penanggung Jawab/ <i>Director</i> Mitra Bestari / <i>Editor Advisory Board</i>	Ketua Laboratorium Program Studi Sosiologi Prof. Dr. Hary Yuswadi (Universitas Jember) Prof. Dr. Bustami Rachman (Universitas Jember) Prof. Dr. Musta'in Masud (Universitas Airlangga) Prof. Dr. Warsono (Universitas Negeri Surabaya) Hanneman Samuel, P.hD (Universitas Indonesia) Prof.Dr. Kliwon Hidayat (Universitas Brawijaya) Dr. A. Latief Wiyata (Universitas Jember) Prof. Dr.Syamsul Maarif, M.si (Universitas Jember)
Pemimpin Redaksi / <i>Chief Editor</i>	Raudlatul Jannah
Dewan Redaksi / <i>Editorial Board</i>	Hery Prasetyo Joko Mulyono Nurul Hidayat Maulana Surya Kusumah
Sekretaris	Baiq Lily Handayani
Copyeditor	Dien Vidia Rosa
Layout Naskah	Abdul Aziz
Alamat Redaksi	Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Jember Jl.Kalimantan 37 Jember Email: etitas_sosiologiunej@yahoo.com
ISSN	2088-8260
Penerbit	Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Jember

Penanggulangan Bencana Berbasis Pengembangan Komunitas (*Community Development*)

Oleh: Abdus Sair¹²

ABSTRACT

The disaster management is an important issue as an attempt to make policy on development, prevention, emergency response and disaster rehabilitation. This effort is the responsibility of three parties: government, private and community to ensure that everyone gets the social protection and security. However, the disaster management is now still viewed from the perspective of science, focusing more on the physical building rather than on the community development itself. This article aims at discussing sociologically the importance of strengthening the community awareness on disasters and of the development of community-based disaster management, hoping that the disaster resilient communities are established.

Keywords: *disaster management, sociological perspectives, community development, and disaster resilient communities*

¹² Dosen Sosiologi Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). E-mail : abdussyair@yahoo.com



Pendahuluan

Bencana di Indonesia tidak bakal selesai dibicarakan dengan menggunakan perspektif apapun, ini karena wilayah Indonesia berada di tiga pertemuan tumbukan lempeng tektonik, yakni; lempeng Hindia Australia yang bergerak ke utara, dan menunjam ke bawah karena bertumbukan dengan lempeng Euroasia di bawah laut sebelah barat Sumatera sampai di selatan Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari arah timur lempeng Pasifik bergerak ke arah barat menunjam ke bawah lempeng Euroasia di daerah Laut Banda-Halmahera (*"teori plate tectonic"*). Daerah jalur penunjaman lempeng tektonik itu disebut dengan *"subduction zone"* yang merupakan jalur gempa, sementara di bagian utara yang disebut *"inner zone"* merupakan tempat jalur sabuk gunung berapi¹³.

Dengan posisi tersebut, memungkinkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan dengan bencana alam, mulai gempa bumi, tsunami, banjir bandang, hingga tanah longsor. Sebagaimana diketahui, hampir setiap tahun Indonesia telah mengalami bencana alam itu, tahun 2010 misalnya ada 1.999 bencana, tahun 2011 ada 1.663 bencana dan pada tahun 2012 ada 730 bencana.

Bencana yang sangat *dahsyat* yang dialami Indonesia adalah gempa bumi dan tsunami yang

terjadi pada tanggal 24 Desember 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Propinsi Sumatera Utara. Bencana itu bisa dibilang terbesar dengan korban 120.000 orang meninggal, 93.088 orang hilang, dan 4.632 orang luka-luka. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2006, peristiwa yang sama juga melanda pantai Selatan Jawa (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Cilacap, Kebumen, Gunung Kidul dan Tulung Agung) yang menelan korban 684 orang meninggal dunia, 82 orang hilang dan korban dirawat inap sebanyak 477 orang dari 11.021 orang yang luka-luka. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 25 Oktober 2010, peristiwa gempa bumi dan tsunami kembali terjadi di Kabupaten Mentawai Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah korban sebanyak 509 orang

Tidak hanya sampai di situ, belakangan bencana alam itu ternyata juga melanda hampir di seluruh tanah air, mulai di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Kalimantan. Dan yang cukup menjadi perhatian publik adalah bencana banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan Manado Sulawesi Utara, serta meletusnya Gunung Sinabung Sumatera Utara. Sebagai ibu kota negara, Jakarta telah menjadi wilayah langganan bencana (banjir) setiap tahun. Data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyebutkan bahwa, banjir yang terjadi di Jakarta pada hari Minggu 12 Januari 2014 itu telah "menenggelamkan" 15 Kecamatan dan 20 Kelurahan, diantaranya adalah Kampung Pulo, Pangkalan

¹³ Saptadi dan Djamil. *Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama BPBD D.I. Yogyakarta*. Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012, hal 1-2



Jati Malang, Cililitan Kecil, dan Cakung. Sementara ada sekitar 11.924 warga yang terkena banjir dan 924 diantaranya harus mengungsi¹⁴.

Demikian juga yang terjadi di Manado Sulawesi Utara. Banjir bandang yang terjadi di wilayah itu harus menelan korban 15 orang meninggal dunia, dan lebih dari 40.000 KK harus mengungsi. Tak hanya di Manado, bencana banjir itu ternyata juga melanda Kabupaten lain di Sulawesi Utara, antara lain di Minahasa, Minahasa Selatan, Boalang Mangondo dan Bomut Utara¹⁵. Melengkapi daftar bencana di atas, bencana meletusnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga menjadi perhatian kita, mengingat bencana ini telah berjalan 4 bulan lebih lamanya. Gunung yang masih aktif itu telah meletus pertama kalinya pada tanggal 15 September 2013, dan hingga kini Gunung yang terletak di Kabupaten Karo tersebut masih menyemburkan abu vulkanik dengan intensitas yang luar biasa. Data yang dihimpun BPBD Sumatera Utara menunjukkan bahwa hingga pertengahan Januari 2014 telah ada 16 orang meninggal dan lebih dari 26.000 jiwa mengungsi, yang meliputi 8.161 KK dan berada di 39 titik pengungsian¹⁶.

Dari sederet bencana alam di atas, dapat dimengerti bahwa wilayah Indonesia memang rawan

dengan segala bencana. Wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan posisi silang antara dua benua dan dua samudera adalah faktor kerawanan tersebut, sehingga bagaimanapun masyarakat Indonesia pasti akan mengalami bencana itu. Resiko bencana berupa kematian, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, harus mengungsi, kerusakan, kehilangan harta serta gangguan terhadap kegiatan masyarakat juga merupakan konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat Indonesia sewaktu-waktu.

Karena itu, penanggulangan bencana menjadi isu penting sebagai upaya penetapan kebijakan pembangunan, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi akibat bencana. Upaya ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin setiap orang dalam mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana tersebut¹⁷. Apalagi dampak bencana tak hanya menimbulkan kerugian materi semata, melainkan juga dapat menimbulkan kerugian sosial berupa dis-organisasi sosial, kerentanan sistem sosial, interaksi yang

¹⁴ Antara News. 924 warga Jakarta Mengungsi Akibat Banjir, 14 Januari 2014

¹⁵ Lipsus.kompas.com. Banjir Manado 2014, diakses pada tanggal 17 Januari 2014

¹⁶ Suarapembaruan.com. Tetapkan Erupsi Gunung Sinabung Sebagai Bencana Nasional, di akses tanggal 17 Januari 2014

¹⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, secara tersirat maupun tersurat, tanggung jawab itu tidak hanya ada di pemerintah, namun juga ada di masyarakat yakni setiap masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan.

mengarah pada konflik sosial¹⁸, dan juga anti empati.

Mencermati masalah ini, banyak kalangan menilai bahwa penanggulangan bencana menjadi kajian penting yang tak bisa dipandang sepele, apalagi hanya dilihat dari sudut pandang ilmu pasti yang konsentrasinya lebih kepada pembangunan fisik semata. Penanggulangan bencana dari sudut pandang sosiologis menjadi penting dan signifikan untuk mengetahui pengetahuan mendasar tentang hal yang mesti dilakukan dalam menanggulangi bencana. Sudut pandang ini tak hanya karena perilaku dan persepsi masyarakat terhadap bencana penting dipahami, melainkan juga karena ilmu bencana telah mengalami perubahan paradigma. Kini, bencana bukan lagi dianggap sebagai fenomena yang sporadis, namun harus dikelola dan direduksi. Bencana bukan lagi dianggap sebagai *hazard* yang menempatkan bencana sebagai sesuatu yang *absurd* untuk dikelola. Akan tetapi, bagaimana unsur keselamatan (*safety*) ditempatkan pada posisi sentral dalam bencana tersebut¹⁹.

Oleh sebab itu, istilah pengembangan komunitas (*community development*) yang akan digunakan dalam tulisan ini

dimaksudkan sebagai cara bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap bencana itu. Hal ini terkait dengan lima (5) alasan penting, pengembangan komunitas dalam menghadapi resiko bencana. *Pertama*, karena masyarakat adalah korban dari bencana tersebut. *Kedua*, masyarakat jauh lebih penting diberi kemampuan dan daya tahan menghadapi krisis lingkungan dan bencana. *Ketiga*, ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana (*bottom up approach*), jauh lebih efektif jika dibandingkan melalui intervensi pemerintah (*top down approach*) karena acapkali *ahistoris* atau tidak memperhatikan harapan dan konstruk masyarakat tentang bencana. *Keempat*, paradigma penanggulangan bencana telah berubah dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan *preparadness*. *Kelima*, setiap kelompok masyarakat selalu memiliki pengetahuan sendiri (*indigenous knowledge*) dan strategi mereka sendiri (*coping strategis*) dalam merespon bencana²⁰.

Dari sinilah, maka tulisan ini akan berusaha mengurai penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas yang *diadon* melalui cara pandang sosiologi. Tulisan ini dibagi dua bagian yakni tentang pentingnya penguatan kesadaran masyarakat terhadap bencana, dan tentang penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas.

¹⁸ Syamsul Maarif. *Bencana dan Penanggulangannya Tinjauan Dari Aspek Sosiologis*. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, hal 2

¹⁹ Wasisto Raharji Jati. *Analisis Penanggulangan Bencana Berbasis Perspektif Cultural Theory*. Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 4 Nomor 1 Tahun 2013, hal 1

²⁰ Zainuddin Maliki. *Pengembangan Kesadaran Resiko Bencana Bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV*. Makalah tanpa tahun, hal 4-6



Pentingnya Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa krisis lingkungan yang menyebabkan bencana alam tak hanya disebabkan oleh posisi Indonesia yang rentan dengan bencana itu, melainkan juga disebabkan oleh ulah manusia. Penebangan hutan di sejumlah daerah, pembukaan lahan baru secara illegal, dan industrialisasi ekstraktif yang tak terkendali, adalah sederet perilaku manusia yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan ini, termasuk yang menyebabkan terjadinya banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya di sejumlah daerah. Sebagaimana di-releasa oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sepanjang Februari hingga akhir 2011 misalnya, kejadian banjir telah melanda beberapa kota di Indonesia. Angkanya meningkat sekitar 11% dari tahun 2010 yakni 345 kejadian²¹. Demikian juga pada tahun 2013 yang lalu, angkanya juga naik menjadi 300% yakni mencapai 1.392 kejadian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dan minimnya daya tampung air²².

Pangkal dari semua kejadian di atas tidak lain karena ulah manusia yang tidak mempertimbangkan dampak buruk kerusakan lingkungan. Bagaimana mungkin hutan Indonesia yang dulu dianggap sebagai paru-paru dunia misalnya, harus mengalami *deforestasi* yang luar

biasa. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survey Indonesia dan Bank Dunia atas hutan Indonesia pada tahun 1999, menggambarkan bahwa pengrusakan hutan itu berjalan sangat signifikan. Pada tahun 1985-1997 *deforestasi* mencapai 1,7 hektar. Sementara pada periode 1997-2000 *deforestasi* meningkat menjadi 3,8 juta hektar pertahun. Padahal pada tahun 1950-an, 84 persen luas daratan Indonesia itu dianggap masih penuh dengan hutan primer dan sekunder²³.

Kondisi di atas ternyata juga diperparah dengan pengelolaan hutan yang amburadul, sebagaimana dijelaskan oleh Ratih²⁴ (Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi), bahwa *deforestasi* yang terjadi di atas juga disebabkan oleh *overcapacity* industri pengelolaan kayu, sejak awalnya, harga kayu bulat domestik yang terlalu murah, akibat kebijakan pemerintah dalam sektor kehutanan dan industri kayu yang tidak tepat, dimana lebih menguntungkan pengusaha di sektor kehutanan ketimbang rakyat sekitar kawasan atau masyarakat pada umumnya.

Selain itu, kenyataan di atas juga diperumit dengan perilaku korupsi pengelolaan hutan yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. *Human Rights Watch* (HRW) pada tahun 2006 pernah mengungkapkan bahwa, antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, lebih dari setengah kayu tebangan Indonesia yang merupakan hasil dari pembalakan liar luput dari pajak.

²¹ Laporan Walhi tahun 2011, yang dikutip dalam Zainuddin Maliki, ibid hal 3

²² News.Detik.Com. *Walhi: Jumlah Banjir Nasional Meningkat Hampir 300% di 2013*, diakses pada tanggal 20 Januari 2014

²³ Deddy Ratih. *Upaya Pemulihan Hutan Indonesia dari Paraktek Kelola Yang Amburadul*, Makalah tanpa tahun, hal 1

²⁴ Ibid, hal 2

Subsidi siluman, termasuk penetapan harga kayu dan nilai tukar mata uang yang oleh pemerintah sengaja dipatok lebih rendah dari harga riil dan penghindaran pajak oleh eksportir dengan taktik yang dikenal sebagai "harga transfer" semakin memperbesar kerugian yang ada. Sehingga total kerugian yang menggerogoti negara Indonesia pada tahun 2006 itu sebesar 2 milyar US Dollar.

Dari fakta ini, dapat dimengerti bahwa krisis lingkungan yang dialami Indonesia selama ini bukan soal karena kondisi wilayah semata, melainkan juga karena perilaku semua komponen bangsa ini, mulai kebijakan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang kurang mempertimbangkan perencanaan strategis pembangunan nasional berwawasan lingkungan dan pengurangan resiko bencana. Apalagi belakangan ada fakta bahwa kebijakan pembangunan nasional khususnya di sektor kehutanan, pertambangan dan industri lainnya, sebagai penyebab kehancuran ekologis tersebut. Atas kondisi inilah, barangkali tidak salah apa yang disampaikan Mahatma Gandhi dalam satu kalimatnya begini; "*Alam memang telah menyediakan segalanya, akan tetapi semua itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia*".

Karena itu, penting dipahami bahwa masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan serius atas krisis lingkungan ini. Bencana alam yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan tersebut pada akhirnya harus membuat masyarakat beresiko kehilangan segalanya (mulai materi hingga keluarga), bahkan juga akan kehilangan

berbagai sumber pencegahan dan perlindungan dari ancaman bencana tersebut. Sehingga wajar kalau belakangan muncul dorongan agar kebijakan yang diikuti dengan aksi nyata tentang penguatan kesadaran masyarakat terhadap bencana menjadi penting dilakukan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana, yang ditandai dengan kemampuan mencegah dan meredam, dengan modal pengetahuan geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang baik.

Kebijakan itu dapat dibuat melalui berbagai rujukan yang selama ini menjadi *best practices*. Sementara format penguatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana itu dapat dirujuk dan dikembangkan dari berbagai tokoh yang selama ini banyak dibicarakan, termasuk dari apa yang diusulkan oleh Zainuddin Maliki²⁵ berikut ini:

a. Membangun Kesadaran Masyarakat Tangguh Bencana

Upaya untuk mengurangi resiko bencana adalah menjadikan masyarakat tangguh bencana. Masyarakat yang demikian ini ditandai dengan pemahaman yang tinggi tentang pemetaan bencana. Bencana apa saja yang akan dihadapi, siapa dan apa saja yang berpotensi terkena bencana. Mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi itu dengan modal spasial, infrastruktur, sosial,

²⁵ Zainuddin Maliki. *Pengembangan Kesadaran Resiko Bencana Bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV*. Makalah tanpa tahun, hal 6-10

ekonomi, teknologi, demografi, dan administrasi yang dapat dimobilisasi untuk beradaptasi, sehingga mampu mempertahankan tingkat fungsi dan dan struktur kehidupan yang baik.

Masyarakat tangguh bencana juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk mengurangi risiko bencana. Mereka mampu menentukan cara mengambil tindakan fisik, kelembagaan, sosial atau ekonomi dengan tepat dan cepat. Mereka juga memiliki kepemimpinan dan manajemen penanggulangan bencana yang efektif, yang dipelajari dari bencana masa lalu yang dialami sendiri maupun yang dialami orang lain, dan menggunakannya untuk kepentingan diri menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di masa mendatang.

Lebih jauh, masyarakat tangguh bencana juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir sumber daya manusia di sekitarnya guna mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas diri demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini karena mereka telah memiliki ketahanan sosial yang tangguh. Ketahanan sosial tersebut diperoleh melalui kepercayaan dan keeratan sosial²⁶ diantara mereka

²⁶ Francis Fukuyama dalam bukunya *Trust: The Social Virtues and The Creation of Property* (1995), menjelaskan bahwa kepercayaan sosial yang tinggi dalam memelihara keeratan sosial komunitasnya akan mampu mencapai kejayaan ekonomi pada zaman kompetisi saat ini. Tesis ini barangkali juga bisa digunakan sebagai dasar membangun ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi resiko bencana di Indonesia.

dengan pihak luar, seperti pemerintah dan swasta. Ketahanan sosial ini juga dapat menjadi benteng yang kuat dalam harmonisasi dengan lingkungan dan pemimpin untuk bersama menghadapi berbagai persoalan yang melanda mereka terutama persoalan menghadapi secara beruntun musibah bencana alam.

Sementara karakteristik ketahanan sosial masyarakat tersebut dapat dilihat dari apa yang disebutkan oleh Twigg John²⁷. dalam bukunya *Characteristics of A Disaster-Resilient Community* (2007), sebagai berikut; *Pertama*, mereka memiliki kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi. *Kedua*, mereka memiliki kapasitas untuk mengelola atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka. *Ketiga*, mereka memiliki kapasitas untuk memulihkan diri atau melatih balik setelah mengalami bencana.

b. Pendidikan Kebencanaan

Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang risiko bencana umumnya lebih siap menghadapi bencana, dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan. Sebab, masyarakat yang demikian ini tahu persis risiko apa yang akan dihadapi, serta tahu siapa dan apa yang akan mungkin terancam dari potensi bencana tersebut di sekitarnya.

²⁷ Twigg, J. dalam bukunya *Characteristics of A Disaster-Resilient Community* (2007)

Modal yang mereka miliki, seperti pengetahuan mitigasi, geografi, sosial, ekonomi, dan teknologi adalah instrumen paling penting dalam menanggulangi bencana tersebut. Oleh sebab itu, memberikan pendidikan kebencanaan bagi masyarakat adalah langkah yang mesti dilakukan oleh pemerintah dengan komitmen, intensitas, dan target sasaran yang tepat, serta dengan langkah yang berkelanjutan (*sustainable*).

Sejak tahun 2010, dunia pendidikan nasional sebetulnya telah merespon isu ini dengan membuat surat edaran ke sekolah-sekolah di Indonesia, terutama sekolah di daerah yang rawan bencana. Kementerian pendidikan juga sudah membuat modul pendidikan kesiapsiagaan bencana, namun belum ditransformasikan ke kurikulum pendidikan. Pemerintah semestinya terus mendorong agar pendidikan kebencanaan diterapkan di dunia pendidikan, agar anak-anak tidak tercerabut dari lingkungannya. Apalagi intensitas bencana alam di Indonesia terus meningkat setiap tahun, maka korban juga akan terus berjatuhan.

Inti dari pendidikan kebencanaan adalah pemberian bekal pengetahuan kepada mereka agar sadar akan pentingnya pelatihan dan simulasi tanggap darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat luas. Pendidikan kebencanaan juga merupakan upaya menanamkan kesadaran kepada anak didik tentang psikologis orang yang tertimpa bencana sehingga dapat ditranmisikan kepada masyarakat yang belum mengenal potensi kerawanan bencana. Selain itu,

menurut Lendo Novo²⁸, pendidikan di sekolah-sekolah sudah seharusnya mengajarkan anak-anak didik untuk hidup harmonis bersama alam. Dengan pengetahuan lingkungan yang kuat, anak-anak Indonesia akan mampu memanfaatkan potensi alam untuk kesejahteraan serta menjaga alam sebaik-baiknya guna mencegah terjadinya bencana atau kerugian yang lebih besar dari fenomena alam tersebut.

c. Informasi dan Kesiapan Menghadapi Bencana

Sistem informasi juga menjadi salah faktor penting dalam pengurangan resiko bencana. Masyarakat yang berada di wilayah rentan terhadap bencana memerlukan informasi tentang ancaman dan resiko yang akan dihadapi. Informasi yang cepat dan tepat akan membantu mereka lebih siap membuat mitigasi, kedaruratan dan langkah-langkah pasca bencana.

Sistem informasi yang dimaksud bisa berupa Radio Komunitas, sebagaimana yang dilakukan masyarakat di Gunung Merapi Yogyakarta. Secara swadaya mereka membangun Radio Komunitas dengan jangkauan gelombang bisa mencapai 4 kilometer. Radio Komunitas tersebut dimanfaatkan untuk memberikan informasi sekaligus mengenalkan ancaman merapi, serta pengenalan kapasitas yang harus dimiliki

²⁸ Lendo Novo adalah pemerhati pendidikan lingkungan dan juga penggagas sekolah alam, lihat tulisan Mohammad Takdir Ilahi. *Wacana Kurikulum Kebencanaan*, www.balipost, 13 November 2010

masyarakat, dan kerentanan yang akan dihadapi. Selain itu, Radio Komunitas juga menyiarkan lagu-lagu kesukaan masyarakat di sekitar. Pada saat darurat, mereka melaporkan status merapi, menginformasikan kondisi keluarga dan masyarakat di wilayah tersebut.

Namun problemnya, tidak semua masyarakat dapat dengan mudah secara swadaya mendirikan Radio Komunitas semacam di Yogyakarta. Kesadaran dan kemampuan mendirikan semacam di atas seringkali menjadi kendala yang dihadapi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Karena itulah, peran pemerintah atau *stakeholder* yang lain dapat menjadi penggerak dan pendiri untuk membangun sistem informasi semacam di atas. Terutama sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, dengan menyesuaikan kultur dan sosial yang ada.

Sebagaimana dijelaskan Juhana, dkk²⁹, sistem informasi bencana setidaknya harus memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dari masyarakat, *pertama*, soal identifikasi tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana, *kedua*, cara bagaimana agar bencana tidak menimbulkan korban yang banyak, *ketiga*, apa-apa yang harus dilakukan, kapan dan sumber daya apa yang dibutuhkan, siapa yang

bertanggung jawab dan kepada siapa harus berkoordinasi.

d. Audit Sosial

Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana lebih efektif untuk mengurangi resiko bencana, termasuk melibatkan masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi (*movev*). Audit sosial sebagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang bencana dan resiko yang mungkin dihadapi masyarakat, dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat merupakan cara yang dinilai sangat efektif.

Bentuk audit sosial ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Klaten Yogyakarta. Dengan dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mereka mengumpulkan informasi tentang dampak erupsi Gunung Merapi. Informasi yang dikumpulkan adalah berbagai informasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan erupsi, sekaligus usulan masyarakat terkait dengan model *recovery*. Hasil audit oleh masyarakat dan kepada masyarakat dikumpulkan dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten guna mendapatkan respon dan kejelasan³⁰.

Contoh yang lain adalah di Nikaragua, setelah terjadi puting beliung pada Oktober 1998, sebanyak 320 NGO dan organisasi sosial menyelenggarakan audit sosial dalam upaya memasukkan

²⁹ Tutun Juhana, Jason Widagdo, Ririn Nur Widyani. *Pengembangan Sistem Komunikasi Seluler Darurat Serta Aplikasi Kaji Cepat Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Tim Reaksi Cepat Pada Situasi Bencana*. Jurnal Penganggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012, hal 27

³⁰ www.suarakomunitas.net. *Menggal Audit Sosial*, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

pandangan masyarakat dalam perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengumpulkan informasi melalui review dokumen kelembagaan, survey sebanyak 10.000 rumah tangga di 16 kota yang terkena puting beliung, interview informan kunci dan kelompok diskusi, pemimpin masyarakat, walikota dan sejumlah pimpinan organisasi lokal³¹.

Secara sosiologis, penggalian fakta dalam audit sosial adalah berupaya menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu fenomena dimana usaha-usaha itu dilakukan dengan menggunakan metode telaah secara terus menerus sampai ditemukan fakta dasarnya dalam konsensus. Fokus perhatian dalam suatu audit sosial adalah masalah, yang muncul dalam pikiran peserta konsensus berdasarkan penelaahan situasi yang meragukan sampai ditemukan fakta dasarnya. Intinya dengan audit ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan dan mengungkapkan pendapatnya tentang bagaimana dan apa yang mesti dilakukan dalam menghadapi bencana. Tak hanya itu audit ini juga menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan budaya guna mengurangi resiko bencana secara efektif.

e. Budaya Aman

Resiko bencana dapat dikurangi apabila masyarakat memiliki budaya aman. Budaya aman ditandai dengan pemahaman bahwa mereka menjadi bagian dari bencana, dan memahami berbagai langkah pengurangan resiko bencana itu yang direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya aman dapat dibentuk melalui pendidikan dan penguatan bagi masyarakat yang dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Budaya aman sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan mengurangi resiko bencana. Melalui budaya ini masyarakat dapat mengerti dan menjelaskan siapa, apa dan dimana kerentanan terhadap resiko terjadi dan bagaimana cara mengantisipasinya.

Namun demikian, pembentukan budaya aman ini tidak mudah dilakukan, setidaknya butuh waktu dan proses panjang. Tidak cukup melalui satu hingga dua intervensi, melainkan diperlukan berbagai bentuk kegiatan untuk target kelompok, perlu diberi penjelasan dan penyadaran yang dilakukan secara berulang kali. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berfikir, bertanya dan melakukan validasi informasi yang mereka terima. Perubahan sikap masyarakat ini memerlukan waktu berbulan-bulan dan bahkan bisa jadi bertahun-tahun.

Selain itu, masyarakat juga harus selalu diberi penguatan, bukan hanya sekedar ceramah mengenai etika, dan perilaku yang diharapkan, melainkan juga secara

³¹ Zainuddin Maliki. *Pengembangan Kesadaran Resiko Bencana Bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV*. Makalah tanpa tahun, op cit hal 8



partisipatoris dan *bottom up* harus menjadi pertimbangan karena umumnya masyarakat hanya akan mengikuti manakala mereka merasa memecahkan masalahnya sendiri. Masyarakat juga biasanya akan bekerja manakala mereka merasa apa yang dikerjakan merupakan ide mereka sendiri.

f. Hidup Selaras Dengan Bencana (*Living Harmony With Disaster*)

Hidup harmoni dengan bencana adalah cara masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. Pola ini ditandai dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menghadapi bencana. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat yang hidup di pinggiran sungai bengawan Solo, yang mengalir dari Bojonegoro, Lamongan, Tuban, hingga Gresik, selalu menjadi korban banjir setiap tahun. Unikny mereka enggan pindah ke tempat lain, melainkan memilih hidup selaras dengan banjir tersebut. Yang mereka lakukan adalah menaikkan lantai rumah, menyiapkan alat untuk menjaring ikan yang datang beserta banjir, dan melatih anak-anaknya pandai berenang sedari kecil.

Penanggulangan Bencana Berbasis Pengembangan Komunitas

Pengembangan komunitas (*community development*) pada dasarnya adalah strategi perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah pada tingkat komunitas. Sebagian pakar mengatakan, pengembangan komunitas ini adalah proses

terencana dan terorganisir dalam rangka mendidik masyarakat agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga dapat mengatur dan ikut serta dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di lingkungannya³². Pakar yang lain mengatakan, pengembangan komunitas adalah metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya³³.

Dalam ilmu kesejahteraan sosial, pengembangan komunitas ini dikenal dengan beberapa nama atau istilah, seperti pengorganisasi masyarakat (*community organization*), pekerjaan kemasyarakatan (*community work*), pekerjaan sosial dengan masyarakat (*social work with community*), dan praktek pekerjaan sosial makro (*social work macro practice*). Jika dilihat dari tujuan dan pendekatan yang digunakannya, pengembangan masyarakat disebut sebagai terapi masyarakat (*community therapy*) atau intervensi masyarakat (*community intervention*). Namun di dunia industri, istilah pengembangan masyarakat ini justru identik dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)³⁴.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan masyarakat disebut sebagai konsep

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 2005a

³³ Creig. *The Community Development Reader: History, Themes and Issues*. 2011

³⁴ Edi Suharto. *Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial*. Makalah, 2006, hal 1-2

pembangunan, utamanya karena ide partisipasi bersama yang disinergikan dengan upaya-upaya pemerintah untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Sasaran dari pengembangan komunitas ini adalah untuk pembangunan kapasitas dan pengembangan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segenap aspek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat³⁵.

Sementara dalam konteks penanggulangan bencana, pengembangan komunitas diartikan sebagai ide untuk membantu pemerintah membangun kesadaran sekaligus memberdayakan masyarakat terhadap usaha penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Ide ini dimaksudkan karena ada perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana, yang implementasinya dirujuk dari hasil deklarasi Hyogo Framework for Action (HFA) 2009. 2005, yaitu: (1) memastikan bahwa pengurangan resiko bencana merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, (2) mengidentifikasi, mengkaji dan memonitor risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini, (3) menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketangguhan di semua tingkatan, (4) mengurangi faktor-faktor yang mendasar, (5) memperkuat

kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif³⁶.

Di Indonesia, pengembangan komunitas ini semakin disadari sebagai suatu hal yang perlu diwujudkan guna meminimalisir risiko bencana, apalagi bencana bagi masyarakat Indonesia telah menjadi ritus yang hampir terjadi setiap saat. Kesadaran pentingnya *community development (comdev)* ini dimulai ketika bencana yang melanda masyarakat Indonesia seperti tak ada solusinya meski banyak instrumen yang telah dibuat pemerintah, mulai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, teknis penanggulangan bencana, hingga kajian akademis dari berbagai pakar untuk mencari solusi. Namun korban dari bencana itu selalu tidak bisa dihindari, bahkan untuk meminimalisir korban saja tidak mampu dilakukan. Alasan yang muncul adalah masyarakat tidak cukup pengetahuan tentang bencana itu, dan tidak cukup tahu tentang bagaimana cara mereka untuk menghadapi risikonya.

Secara sosiologis, pengembangan komunitas ini dianggap urgen sebagai metode perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah pada tingkat komunitas. Apalagi metode ini tak banyak diterapkan pada konteks penanggulangan bencana. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa metode ini penting dilakukan, karena masyarakatlah yang menjadi korban atas bencana tersebut, dan mereka pulalah yang umumnya paling awal harus melakukan sesuatu

³⁵ Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. *Executive Summary: Kajian Tentang Model Community Development di Daerah*. 2010, hal i

³⁶ Ebasonline.blogdetik.com. Edi Basuki. *Pengembangan Masyarakat Sadar Bencana*. diakses pada 24 Januari 2014

pasca bencana itu. Karena itu *comdev* ini dianggap perlu untuk mengembangkan masyarakat agar memiliki kemampuan penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan untuk mengurangi risiko bencana, yang pada akhirnya masyarakat diharapkan memiliki cara mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana tersebut.

Selain itu, metode ini juga dianggap penting karena ada keyakinan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan sendiri (*indigenous knowledge*) dalam merespon bencana. Pengetahuan dan strategi masyarakat tersebut dianggap lebih "canggih" dibandingkan dengan mereka yang memiliki *ekspert* dibidang bencana sekalipun. Sebagai contoh, di beberapa wilayah di negeri ini, ada banyak kelompok masyarakat yang mampu menghadapi bencana alam karena mereka memiliki *survival strategy*-nya sendiri, seperti kearifan lokal masyarakat Kunto Sulawesi, masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan, dan masyarakat asli Jakun di Tasik Chini, Malaysia. Kenyataan ini juga selaras dengan apa yang dilakukan Briand Ward (*mantan Direktur Asian Disaster Preparadnes Center*) yang mengapresiasi keunggulan petani Bangladesh. Bukan hanya karena mereka mampu memahami betapa rentannya menghadapi bencana, melainkan juga karena mereka mampu mengatur strategi merespon bencana. Bahkan Briand berani mengatakan bahwa petani di Bangladesh memiliki pengetahuan

lima belas tahun lebih maju dibanding seorang Ph.D³⁷.

Alasan lainnya adalah, karena metode ini menyelesaikan masalah pada tingkat komunitas. Pada tingkat tersebut (komunitas masyarakat) pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bencana dianggap dapat dilakukan melalui *treatment* perubahan sosial. Pada tingkat tersebut masyarakat juga dianggap bisa dikembangkan karena memiliki apa yang disebut dengan sentimen komunitas (*sentiment community*), yakni perasaan yang muncul diantara anggota masyarakat bahwa mereka saling memerlukan³⁸, saling membutuhkan untuk bekerjasama menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan menghadapi bencana. Unsur-unsur perasaan komunitas³⁹ tersebut antara lain sebagai berikut;

Pertama, sepeasaan, unsur ini muncul karena setiap orang dalam masyarakat berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dalam kelompok masyarakat, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai "kelompok kami", "perasaan kami", dan sebagainya. Perasaan demikian muncul terutama karena mereka memiliki kepentingan

³⁷ John Twigg, *Disaster Risk Reduction: Mitigation in the Development and Emergencies Programming*, London: Humanitarian Practice Network ODI, 2004, hal 131-135, dalam Zainuddin Maliki. *Pengembangan Kesadaran Resiko Bencana Bagi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV*. Makalah tanpa tahun, op cit hal 6

³⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1995, hal 163

³⁹ R.M. Mac Iver and Charles H. Hal 293, dalam Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1995, ibid hal 164

yang sama di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. *Kedua*, sepenanggungan, unsur ini karena setiap orang sadar akan peranannya dalam kelompok tertentu, dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dalam kelompok dapat dijalankan, sehingga mereka mempunyai kedudukan yang pasti. *Ketiga*, saling memerlukan, unsur ini muncul karena setiap orang yang menjadi bagian dari masyarakat merasakan dirinya tergantung pada komunitas, yang meliputi kebutuhan fisik, maupun kebutuhan psikologis.

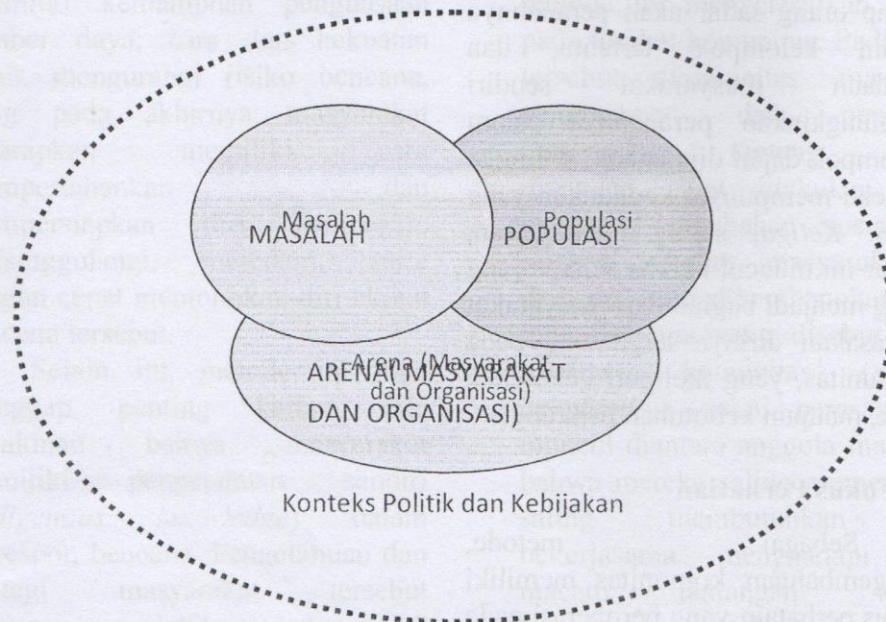
a. Fokus Perhatian

Sebagai metode, pengembangan komunitas memiliki fokus perhatian yang beroperasi pada tiga hal pokok, yakni; masalah, populasi dan arena⁴⁰ (lihat gambar 1.1). Dalam konteks kajian penanggulangan bencana, masalah pokok ini dapat dilihat dari komunitas masyarakat itu sendiri, umumnya mereka memiliki kapasitas dan kontrol yang terbatas dalam melakukan perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kebencanaan. Problem ini hanya dapat dipecahkan melalui perubahan sosial pada tingkat rukun tetangga, organisasi atau komunitas.

⁴⁰ Netting, Kettner, McMurtry (2004;8) dalam Edi Suharto. *Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial*. Makalah, 2006, ibid, hal 3



Gambar 1.1
Fokus Perhatian Pengembangan Masyarakat



Selanjutnya adalah populasi, yang dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat karena sangat menentukan karakteristik dan intensitas masalah yang dihadapi mereka. Pola-pola perkembangan fisik, emosi, kognitif, dan sosial masyarakat dapat dijadikan dasar dalam memahami perilaku masyarakat.

Memahami populasi merupakan aspek penting untuk menyusun program yang akan diterapkan dalam pengembangan masyarakat. Hal ini karena ada banyak kasus, mengapa beberapa kelompok dalam masyarakat lebih senang diberi modal finansial untuk modal usaha kecil, sementara kelompok masyarakat lainnya lebih bergairah jika ditawarkan pelatihan-pelatihan keterampilan hidup (*soft skill*) atau pengembangan kebudayaan lokal. Kelompok masyarakat yang lain lagi lebih

merasa berharga jika di sekitarnya dibangun fasilitas pendidikan pra-sekolah, klinik kesehatan ibu dan anak atau fasilitas umum seperti jalan, sarana air bersih, dan lapangan olah raga. Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosio-kultural masyarakat yang bersangkutan juga oleh tingkat pendidikan, keragaman usia dan jenis kelamin, serta akses mereka terhadap informasi dari dunia luar.

Fokus berikutnya adalah masyarakat, yang merupakan arena dimana pengembangan komunitas akan dilakukan. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada kelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu dengan

batas tertentu⁴¹. Dalam arti luas, masyarakat merujuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat yang demikian ini sering disebut dengan *sosietas* atau *society*. Misalnya, masyarakat global, masyarakat dunia⁴², dan lain-lain.

Pendefinisian masyarakat di atas akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat. Jika masyarakat didefinisikan seperti pengertian pertama, maka pengembangan masyarakat biasanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (*locality development*) pada pemukiman atau wilayah yang relatif kecil⁴³. Namun apabila masyarakat didefinisikan secara lebih luas, maka pengembangan masyarakat seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang menuntut adanya perubahan kebijakan yang umumnya menyentuh konteks politik.

Memahami masyarakat juga harus memahami organisasi di dalamnya, karena masyarakat hakekatnya bukanlah kumpulan individu begitu saja, melainkan merupakan jaringan organisasi yang teratur. Masyarakat menyediakan suprastruktur yang memungkinkan beragam organisasi beroperasi.

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1995, abid hal 163

⁴² Edi Suharto. *Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial*. Makalah, 2006, ibid hal 12

⁴³ Suharto, 2005a, Suharto 2005b dalam Edi Suharto. *Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerja Sosial*. Makalah, 2006, op cid

Sebaliknya, organisasi adalah yang menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi masyarakat. Karena itu, masyarakat dan organisasi adalah arena pengembangan masyarakat, dan disitulah ruang yang harus dilakukan untuk menyusun langkah atau program guna mendidik dan mengembangkan masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi akan penanggulangan bencana.

b. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat juga merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana beserta risiko yang mungkin akan dihadapi. Pembelajaran ini melibatkan sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuannya mengenai bencana dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakannya sendiri guna menghadapi risiko bencana di kemudian hari. Teknik ini sering disebut dengan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, yang memiliki prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

Pertama, belajar dari masyarakat. Prinsip ini dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Prinsip ini juga memberi arti

bahwa pengembangan masyarakat merupakan pembalikan dan metode pembelajaran konvensional yang bersifat 'mengajari' masyarakat. Dalam pengertian yang lain, prinsip ini menjunjung tinggi apa yang menjadi pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara mereka menghadapi bencana.

Kedua, orang lain sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku. Prinsip ini dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat perlu ada "orang luar" sebagai fasilitator, yang membantu masyarakat memberi penyuluhan dan kesadaran tentang pentingnya sadar bencana. Prinsip ini juga menempatkan "orang luar" sebagai "pembantu" yang harus rendah hati serta bersedia untuk menjadi *partner* masyarakat dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan alam. Singkatnya prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai narasumber dan pelaku utama dalam penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat.

Ketiga, saling belajar, saling berbagi pengalaman. Prinsip ini dibangun karena ada fakta objektif bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Semisal soal ilmu mitigasi, demografi, dan teknologi informasi guna mendukung pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana. Demikian juga sebaliknya, fasilitator harus mampu belajar terhadap

masyarakat terutama tentang ilmu lokal yang berkaitan dengan *survival strategy*-nya. Dengan demikian, pengembangan masyarakat ini mampu menciptakan masyarakat dengan modal pengetahuan mitigasi, geografi, sosial, ekonomi, dan teknologi yang baik.

Keempat, keterlibatan semua kelompok masyarakat. Sebagaimana diketahui masyarakat bukanlah suatu kumpulan orang-orang yang homogen, tetapi terdiri dari berbagai kelompok yang mempunyai masalah dan kepentingannya sendiri. Kekeliruan yang sering dibuat adalah menganggap bahwa pimpinan formal, tokoh-tokoh masyarakat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat, dapat mewakili seluruh masyarakat, padahal tidaklah demikian. Dengan prinsip ini diharapkan penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas melibatkan semua komponen masyarakat yang wilayahnya masuk bagian dari rawan bencana. Mulai yang tua hingga yang muda, mulai laki-laki hingga yang perempuan, mulai yang miskin hingga yang kaya, dan seterusnya.

Kelima, santai dan informal. Kegiatan penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat harus diselenggarakan dalam suasana yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, dan informal. Situasi yang santai ini untuk menimbulkan hubungan yang akrab, karena "orang luar" akan berproses masuk sebagai anggota kelompok diskusi. Fasilitator harus dapat memanfaatkan peluang-peluang dalam kegiatan setempat untuk membuka dialog yang penuh kekeluargaan dengan masyarakat.

Keenam, menghargai perbedaan. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang heterogen umumnya terdiri dari orang-orang yang akan memiliki pandangan pribadi atau yang merupakan pandangan golongannya sendiri. Oleh karena itu, semangat yang harus dibina dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat ini, yaitu semangat saling menghargai. Inti dan kegiatan penanggulangan bencana berbasis *community development* ini adalah mencoba melihat sejauh mana pengetahuan dan kesadaran kolektif masyarakat tentang risiko bencana, bukan memberikan rata-rata hasil dari perhitungan statistik.

Ketujuh, triangulasi. Triangulasi merupakan bentuk "pemeriksaan dan pemeriksaan ulang" (*check and recheck*). Triangulasi dilakukan antara lain melalui penganekaragaman keanggotaan tim (keragaman disiplin ilmu), penganekaragaman sumber informasi (keragaman latar belakang golongan masyarakat, keragaman tempat), dan variasi teknik. Prinsip ini dimaksudkan agar penanggulangan bencana berbasis masyarakat ini memiliki pengetahuan yang kompleks, yang diperoleh melalui fasilitator yang berasal berbagai disiplin ilmu yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Kedelapan, mengoptimalkan hasil. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas memerlukan waktu dan tenaga narasumber, pelaksana yang terampil, dan partisipasi warga masyarakat, yang keseluruhannya berkaitan dengan dana atau uang. Namun, alasan tersebut bukanlah

yang utama. Penanggulangan bencana berbasis *community development* ini justru berorientasi pada hasil. Yakni⁴⁴; (1) mewujudkan kemampuan dan kekuatan nyata masyarakat untuk menangkal ancaman bencana terhadap penduduk dan wilayahnya, (2) mewujudkan kemampuan dan penduduk nyata masyarakat untuk melindungi penduduk dan wilayahnya dari ancaman bencana, (3) mewujudkan kemampuan dan kekuatan nyata untuk menangkal ancaman bencana dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat secara swakarya dan swadaya.

Kesembilan, belajar dari kesalahan. Penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat ini tidak mungkin akan berjalan mulus, melainkan akan mengalami kesalahan, dan kesalahan tersebut merupakan hal yang wajar. Yang penting adalah penerapan pengembangan masyarakat tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada dan kemudian belajar dari kekurangan atau kesalahan yang terjadi agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling penting diingat adalah kegiatan penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat ini bukanlah kegiatan "coba-coba" (*trial and error*) yang tanpa perhitungan kritis untuk meminimalkan kesalahan.

⁴⁴ Iwan Subiantoro. Upaya Mengantisipasi Bencana Melalui Kekuatan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2010, hal 15



Kesepuluh, orientasi praktis. Penanggulangan bencana berbasis komunitas ini bukan sebuah teori yang hanya terdiri dari beberapa konsep, melainkan sebuah ide dan metode praktis yang harus dipraktekkan dalam bentuk program kerja, melalui pemecahan masalah dan pengembangan program yang melibatkan masyarakat sebagai komunitas penting dalam penanggulangan bencana itu. Masyarakat adalah aktor utama dalam penanggulangan bencana ini.

Kesebelas, keberlanjutan (*sustainable*). Metode penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas ini bukanlah sebuah "paket kegiatan" yang selesai setelah kegiatan penggalan informasi dianggap cukup. Penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas ini justru merupakan jiwa yang harus dihayati oleh lembaga dan para pelaksana di lapangan, agar program yang dikembangkan secara terus-menerus melandaskan diri dari prinsip dasar pengembangan masyarakat yang mencoba menggerakkan potensi pengetahuan masyarakat tentang strategi penanggulangan bencana.

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa penanggulangan bencana berbasis pengembangan masyarakat, hanya dapat dilakukan dengan pendekatan lokal, yang melibatkan semua komponen masyarakat di wilayah rawan bencana. Masyarakat lokal adalah unsur yang paling penting dalam proses ini, mereka menjadi informan sekaligus aktor untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Proses ini juga tidak dilakukan

secara "sporadis", melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas ini adalah pilihan strategi yang penting diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tangguh akan bencana. Masyarakat yang demikian ini memungkinkan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana selain memiliki relevansi historis juga akan menjadikan semua investasi dan langkah yang dilakukan menjadi efektif. Masyarakat yang demikian ini juga memungkinkan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik tentang resiko bencana dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Pengetahuan tersebut tentu karena dibentuk dari pengetahuan lokal (*indigenous poeple*) yang merujuk pada tradisi kultural, nilai-nilai lokal, kepercayaan dan pandangan lokal masyarakat.

Meskipun memiliki banyak format, seperti membangun masyarakat tangguh bencana, pendidikan kebencanaan, informasi dan kesiapan menghadapi bencana, audit sosial, budaya aman, dan *living harmony with disaster*, penguatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan di atas dapat ditransformasikan di tengah-tengah masyarakat oleh para pemangku kepentingan, terutama oleh pemerintah dengan memilih model transformasi yang tepat, yang pada

intinya menempatkan masyarakat sebagai aktor.

Selanjutnya, kelebihan penanggulangan bencana berbasis pengembangan komunitas ini terletak pada penghargaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Masyarakat menjadi informan sekaligus agen dalam menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Hal tersebut karena masyarakatlah yang menjadi korban atas bencana tersebut, dan masyarakat pulalah yang pertamakalinya harus melakukan sesuatu pasca bencana itu. Karena itu, menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam upaya ini, adalah memperkuat relasi kehidupan masyarakat dengan lingkungan, sehingga impian untuk mengurangi resiko bencana pada tingkat masyarakat dimungkinkan dapat dilakukan secara efektif.

Namun demikian, upaya menciptakan masyarakat yang tangguh dan sadar akan bencana itu, memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang, sebab upaya ini tak bisa dilakukan secara "sporadis", melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*). Upaya ini juga merupakan jiwa yang harus dihayati oleh lembaga dan para pelaksana di lapangan, agar program yang dikembangkan secara terus-menerus melandaskan diri pada prinsip dasar pengembangan masyarakat untuk menggerakkan potensi pengetahuan masyarakat tentang strategi penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Craig, Gary (editor) . *The Community Development Reader: History, Themes and Issues*. The Policy Press University of Bristol, UK. 2011
- Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Property*. 1995.
- John, Twigg. *Characteristics of A Disaster-Resilient Community*. 2007. London:Humanitarian Practice Network ODI
- Juhana, Tutun, Widagdo, Jason, Widyani, Ririn Nur. *Pengembangan Sistem Komunikasi Seluler Darurat Serta Aplikasi Kaji Cepat Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Tim Reaksi Cepat Pada Situasi Bencana*. Jurnal Penganggulangan Bencana Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. *Executive Summary: Kajian Tentang Model Community Development di Daerah*. 2010
- Ratih, Deddy. *Upaya Pemulihan Hutan Indonesia dari Paraktek Kelola Yang Amburadul*, Makalah, tanpa tahun.
- Saptadi dan Djamal. *Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama BPBD D.I*.



- Yogyakarta. Jurnal
Penanggulangan Bencana
Volume 3 Nomor 2 Tahun
2012
- Subiantoro, Iwan. *Upaya
Mengantisipasi Bencana
Melalui Kekuatan Berbasiskan
Masyarakat.* Jurnal Dialog
Penanggulangan Bencana,
Volume 1 Nomor 2 Tahun
2010
- Suharto, Edi. *Pengembangan
Masyarakat Dalam Praktek
Pekerja Sosial.* Makalah, 2006
- Suharto, Edi. *Membangun
Masyarakat Memberdayakan
Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan
Sosial dan Pekerjaan Sosial.*
Bandung, Rafika Aditama.
2005a
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu
Pengantar.* Jakarta.
RajaGrafindo Persada. 1995
- Maarif, Syamsul. *Bencana dan
Penanggulangannya Tinjauan
Dari Aspek Sosiologis.* Jurnal
Dialog Penanggungan
Bencana Volume 1 Nomor 1
Tahun 2010
- Jati, Wasisto Raharji. *Analisis
Penanggulangan Bencana
Berbasis Perspektif Cultural
Theory.* Jurnal Penanggulangan
Bencana Volume 4 Nomor 1
Tahun 2013
- Zainuddin Maliki. *Pengembangan
Kesadaran Resiko Bencana
Bagi Peserta Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV.*
Makalah, tanpa tahun.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Penanggulangan
Bencana
- www.antarane.ws. *924 warga Jakarta
Mengungsi Akibat Banjir*, 14
Januari 2014
- www.lipsus.kompas.com. *Banjir
Manado 2014*, diakses pada
tanggal 17 Januari 2014
- www.suarapembaruan.com.
*Tetapkan Erupsi Gurung
Sinabung Sebagai Bencana
Nasional*, diangkses tanggal 17
Januari 2014
- www.news.detik.com. *Walhi:
Jumlah Banjir Nasional
Meningkat Hampir 300% di
2013*, diakses pada tanggal 20
Januari 2014
- www.balipost, Mohammad Takdir
Ilahi. *Wacana Kurikulum
Kebencanaan*, 13 November
2010. Diakses pada tanggal 20
Januari 2014
- www.suarakomunitas.net. *Menggali
Audit Sosial*, diakses pada
tanggal 23 Januari 2014
- www.ebasonline.blogdetik.com. Edi
Basuki. *Pengembangan
Masyarakat Sadar Bencana.*
diakses pada 24 Januari 2014

